



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2023 - 2026



Larantuka 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dapat tersusun sesuai dengan waktunya.

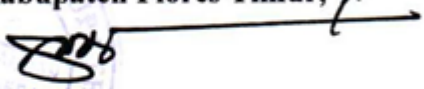
Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur yang difokuskan untuk mendukung pencapaian Visi RPJP Daerah Tahun 2005-2025 yakni ***“Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing”***. Dengan demikian maka Renstra memuat perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2023 - 2026.

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai rencana program dan kegiatan serta target indikator yang telah ditetapkan. Selain itu Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh pihak terkait agar dapat membangun sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing demi tercapainya manfaat pelayanan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa memberikan Rahmad dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian bagi bangsa dan negara di bumi Lamaholot Flores Timur Tercinta.

Larantuka, Maret 2022

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Flores Timur,


YOSEPH A. S. PEHAN KERAf, SE, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 197104261998031012

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistimatika Penulisan	4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKAD	 6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKAD.....	6
2.2. Sumber Daya BKAD.....	10
2.3. Kinerja Pelayanan BKAD	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	21
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	 22
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan ...	22
3.2. Telaahan Visi, Misi Kabupaten Flores Timur Periode 2023-2026.....	22
3.3. Telaahan Renstra K/L	22
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	23
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	24
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 25
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 27
5.1. Strategi	27
5.2. Arah Kebijakan	27
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 29
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 38
 BAB VIII PENUTUP	 39

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dapat tersusun sesuai dengan waktunya.

Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur yang difokuskan untuk mendukung pencapaian Visi RPJP Daerah Tahun 2005-2025 yakni ***“Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing”***. Dengan demikian maka Renstra memuat perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2023 - 2026.

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai rencana program dan kegiatan serta target indikator yang telah ditetapkan. Selain itu Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh pihak terkait agar dapat membangun sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing demi tercapainya manfaat pelayanan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa memberikan Rahmad dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian bagi bangsa dan negara di bumi Lamaholot Flores Timur Tercinta.

Larantuka, Maret 2022

**Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Flores Timur,**

YOSEPH A. S. PEHAN KERAFA, SE, M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 197104261998031012

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistimatika Penulisan	4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKAD	 6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKAD.....	6
2.2. Sumber Daya BKAD.....	10
2.3. Kinerja Pelayanan BKAD	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	21
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	 22
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan ...	22
3.2. Telaahan Visi, Misi Kabupaten Flores Timur Periode 2023-2026.....	22
3.3. Telaahan Renstra K/L	22
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	23
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	24
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 25
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 27
5.1. Strategi	27
5.2. Arah Kebijakan	27
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 29
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 38
 BAB VIII PENUTUP	 39



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026. /

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Lantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Lantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

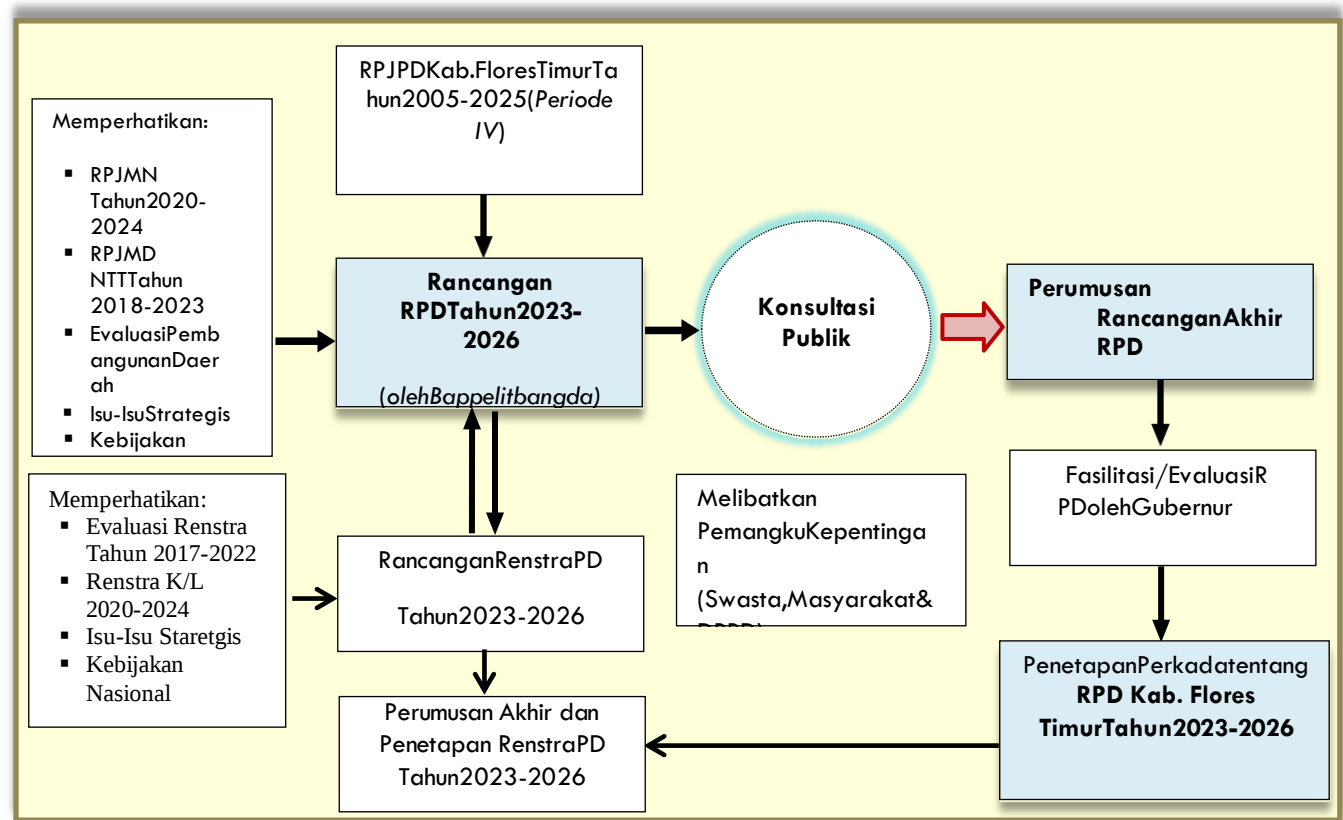
Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun RENSTRA Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

RENSTRA disusun dengan memperhatikan :

- a) Penyelerasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021;
- c) Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
- d) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e) Kebijakan nasional;
- f) Regulasi yang berlaku;
- g) Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

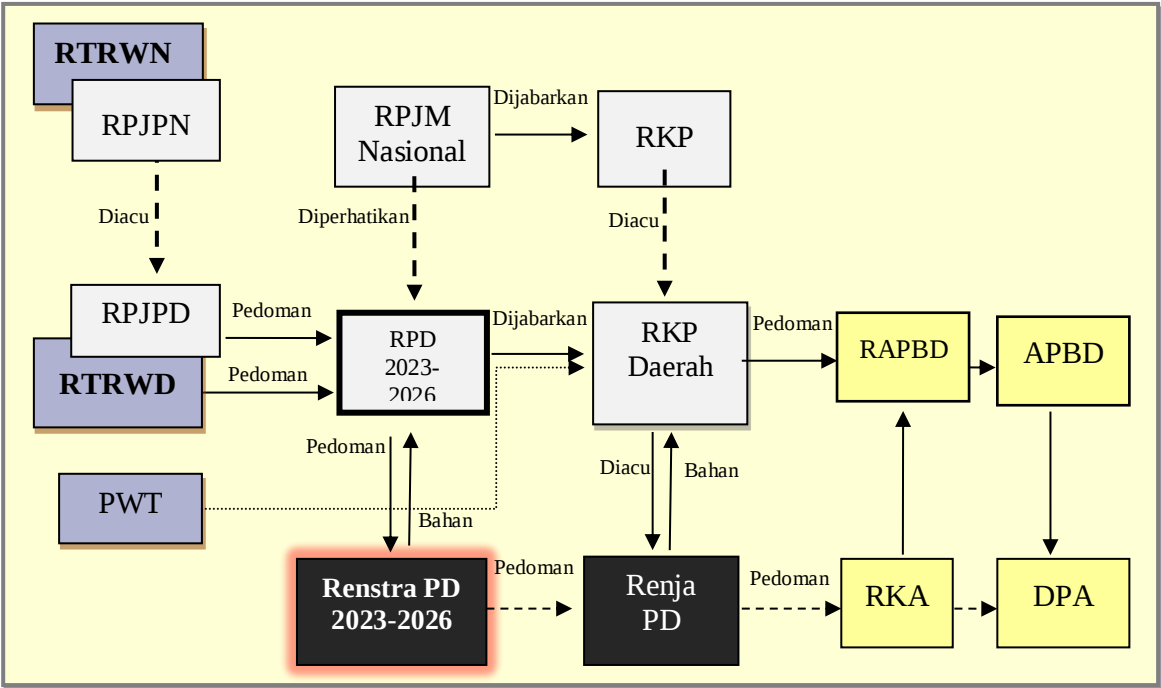
Gambar 1. Alur penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah



Sumber :Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86
Sumber :Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017
(hasil analisis)Tahun 2017 (hasil analisis)

Keterkaitan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut;

Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur;
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Doumen Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Untuk memberikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur;
2. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur;
3. Untuk menetapkan dasar penilaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan periode 2023-2026 yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- Bab 1 : Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;
- Bab 2 : Gambaran Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, memuat tugas pokok, fungsi, dan struktur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, sumberdaya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, kondisi dan kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, serta peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan
- Bab 3 : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, memuat identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;

- Bab 4 : Tujuan dan Sasaran, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.
- Bab 5 : Strategi dan Arah Kebijakan, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam empat tahun mendatang.
- Bab 6 : Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- Bab 7 : Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
- Bab 8 : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Tugas Pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pengelolaan keuangan dan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan Bidang Keuangan Daerah yang meliputi pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan daerah;
- e. Melakukan Validasi Rencana Anggaran Kas (RAK);
- f. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/DPPA- SKPD);
- g. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- h. Pengelolaan administrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. **Kepala Badan**
- b. **Sekretaris, membawahi :**
 - 1) Analis Keuangan Daerah Ahli Muda
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Perencana Ahli Muda

- c. **Bidang Perbendaharaan**, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan Gaji
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Muda
 - 3) Sub Bidang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
- d. **Bidang Perencanaan Anggaran Daerah**, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah II
 - 3) Analis Kebijakan Ahli Pertama
- e. **Bidang Akuntansi**, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan I
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan II
 - 3) Analis Kebijakan Ahli Muda
- f. **Bidang Pengelolaan Aset**, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Pertama
 - 3) Sub Bidang Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Sedangkan tugas dan fungsi setiap jenis jenjang jabatan struktural sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi dan teknis meliputi penyusunan program, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, dan pelaporan lingkup badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan
- b. penyusunan Program dan Anggaran
- c. pengelolaan Keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah
- d. pengelolaan urusan kepegawaian
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan perbendaharaan meliputi perbendaharaan gaji, perbendaharaan non gaji dan penatausahaan pertanggungjawaban.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan perbendaharaan;
- b. Pengoordinasian teknis perbendaharaan;
- c. Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- d. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas;
- e. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan perbendaharaan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan akuntansi yang meliputi penatausahaan dan pelaporan akuntansi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan akuntansi;
- b. Pengoordinasian dan fasilitasi penatausahaan keuangan dan pelaporan akuntansi;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penatausahaan keuangan dan pelaporan akuntansi;
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pelaporan akuntansi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perencanaan Anggaran

Bidang Perencanaan Anggaran, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan perencanaan anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan perencanaan anggaran;
- b. Pengoordinasian dan fasilitasi perencanaan anggaran yang meliputi seluruh perangkat daerah;
- c. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan anggaran;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi teknis perencanaan anggaran satuan perangkat daerah;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan anggaran;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

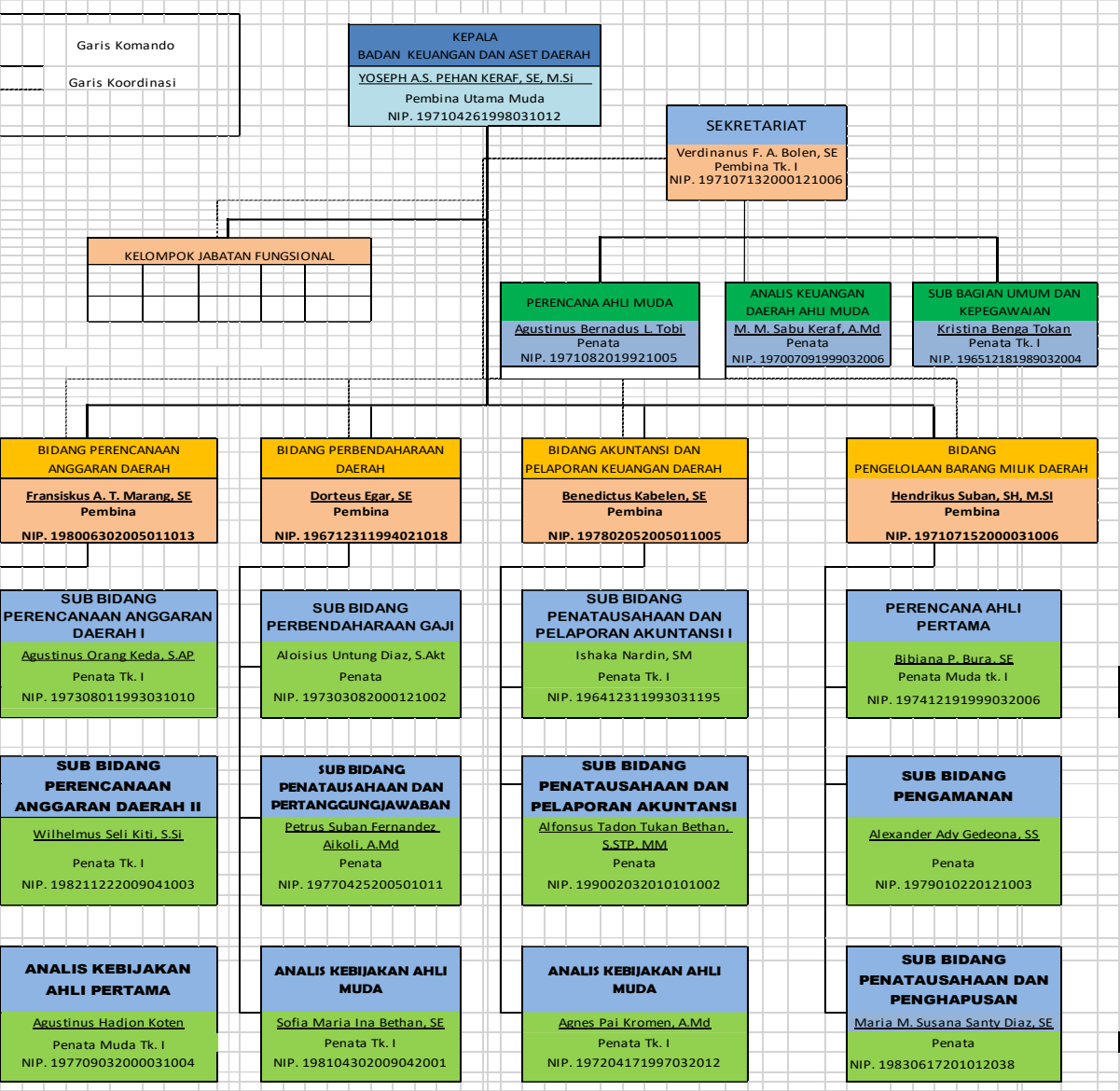
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi : Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah, Pengamanan Aset Daerah, Penatausahaan dan Penghapusan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
- b. Pengadaan Barang Milik Daerah;
- c. Penggunaan Barang Milik Daerah;
- d. Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- e. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- f. Penilaian Barang Milik Daerah;
- g. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- h. Pemusnahan Barang Milik Daerah;
- i. Penghapusan Barang Milik Daerah;
- j. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah.

Struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut:

Tabel 2.1
 Jumlah PNS BKADKabupaten Flores Timur,
 Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S2	2
2	S1	12
3	Diploma III	8
4	SLTA	12
	Jumlah	35 Orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKAD
 Kabupaten Flores Timur,2021

Tabel 2.2
 Jumlah PNS BKAD Kabupaten Flores Timur,
 Berdasarkan Tingkat Eselon Tahun 2021

NO	ESELON	JUMLAH (orang)
1	II.b	1 orang
2	III.a	1 orang
3	III.b	4 orang
4	IV.a	15 orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKAD
 Kabupaten Flores Timur,2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada BKAD Kabupaten Flores Timur kurang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD sebagai aparatur perencanaan.

Sarana dan Prasarana kantor merupakan penunjang kinerja pegawai yang sangat penting untuk dipenuhi karena berkaitan dengan aktifitas dan mobilitas kerja kantor. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Daftar Sarana Dan Prasarana BKD Kabupaten Flores Timur

No	JENIS SARANA/PRASARANA	JUMLAH BARANG	SATUAN	KET.
I.	PERALATAN DAN MESIN			
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)			
	Inova/Minibus	1	Unit	
2	Kendaraan Roda 2 (Dua)			
	Sepeda Motor	28	Unit	
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga :			
1	A.C. Split	24	Unit	
2	Alat Kantor Lainnya	4	Buah	
3	Bangku Tunggu	1	Unit	
4	Brandkas	3	Unit	
5	Dispenser	1	Unit	
6	Filing Cabinet Besi	6	Unit	
7	Filing Cabinet Kayu	1	Buah	
8	Gordyin/Kray	4	Set	
9	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	
10	Kursi Putar	3	Unit	
11	Kursi Rapat	27	Buah	
12	Lap Top	46	Unit	
13	Lemari Es	1	Buah	
14	Lemari Kayu	26	Buah	
15	Meja 1/2 Biro	15	Buah	
16	Meja Kerja Kayu	54	Buah	
17	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Buah	
18	Meja Rapat	4	Buah	
19	Meja Tambahan	3	Buah	
20	Monitor	1	Unit	
21	Note Book	3	Unit	
22	P.C Unit	5	Unit	
23	Peralatan Jaringan lainnya	41	Unit	
24	Peralatan Komputer lainnya	1	Unit	
25	Peralatan Personal Komputer lainnya	4	Unit	
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	46	Unit	
27	Rak Kayu	12	Unit	
28	Server	9	Unit	
29	Sofa	4	Set	
30	Televisi	2	Unit	
31	Treng Air/Tandon Air	1	Unit	
32	CPU (Peralatan Mini Komputer)	1	Unit	
33	Global Positioning System	3	Unit	
34	Alat Tenis Meja	1	Unit	
II.	GEDUNG DAN BANGUNAN			
	Bangunan Gedung Kantor	1	Unit	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKADKabupaten Flores Timur,2021

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Beberapa indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tahun 2017 s/d 2021, meliputi :

Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Flores Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target awal	Target Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Tersediannya rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersediannya dokumen standar satuan harga	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
4	Simda Keuangan, Simda Gaji, Simda Pendapatan, Simda BMD, Siskeudes dan Website DPPKAD	5 Sistem Aplikasi	5 Sistem Aplikasi	5 Sistem Aplikasi	5 Sistem Aplikasi	5 Sistem Aplikasi	5 Sistem Aplikasi	5 Sistem Aplikasi	5 Sistem Aplikasi	5 Sistem Aplikasi	5 Sistem Aplikasi	5 Sistem Aplikasi	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya Laporan keuangan semesteran	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target awal	Target Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Terlaksannya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	229 Desa	229 Desa	229Desa	229Desa	229Desa	229 Desa	229Desa	229Desa	229Desa	229Desa	229Desa	90%	90%	90%	90%	90%
8	Terlaaksannya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa				229Desa					229Desa				90%			90%
9	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	100%	100%	100%	100%	100%
10	Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
11	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	100%	100%	100%	100%	100%
12	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tersediannya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	80%	80%	80%	80%	80%
14	Tersedianya Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	80%	80%	80%	80%	80%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target awal	Target Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Rata-rata waktu penyelesaian SP2D	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	100%	100%	100%	100%	100%
15	Tersedianya Administrasi Belanja Bantuan dan Belanja Tak Terduga	12 Bulan	12 Bulan	12Bulan	12Bulan	12Bulan	12 Bulan	12Bulan	12Bulan	12Bulan	12Bulan	12Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
16	Tertatanya File Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12Bulan	12Bulan	12Bulan	12 Bulan	12Bulan	12Bulan	12Bulan	12Bulan	12Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
17	Terselenggaranya Penataan dan Pengendalian Belanja dan Pembiayaan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12Bulan	12Bulan	12Bulan	12 Bulan	12Bulan	12Bulan	12Bulan	12Bulan	12Bulan	100%	100%	100%	100%	100%
18	Persentase kesesuaian data rincian dan Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda Flotim	90%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Tersedia Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Semesteran dan Inventaris Laporan Barang Tahunan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
20	Tersedianya dokumen aset barang milik daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
21	Tersedianya Tanah milik Pemda	4 Bidang	4 Bidang	4Bidang	4Bidang	4Bidang	4 Bidang	4Bidang	4 idang	4Bidang	4Bidang	4Bidang	100%	100%	100%	100%	100%
22	Terlaksananya Penghapusan barang milik daerah Flores Timur	1 dok	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	30%	100%	0	0	0
23	Tersusunnya RKBMD dan RKPBM	0 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1200	100	100	0	0

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target awal	Target Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah	0 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	12 kali	0	0	0	600	0	0	0	0
25	Terlaksananya Pengamanan Aset Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		1200	100	100	100	100
26	Tersedianya sarana dan prasarana gedung olahraga yang baik	1 gedung GOR, 1 Lapangan Futsal dan 1 Lapangan Tennis	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	12	0	0	0	0	400	0	0	0	0
27	Tersediannya Sertifikat tanah Pemda	289 bidang	40 bidang	40 bidang	40 bidang	40 bidang	40 bidang	12 bidang	40 bidang	40 bidang	40 bidang		30	100	100	100	0
28	Opini BPK atas LKPD Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP						
29	Tersedianya Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok		100	100	100	100	100	
30	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik	80 %	100%	100%	100%	100 %	100 %	12	100	100	100		100	100	100	100	
31	Jumlah LPJU yang diperbaiki	40 unit	80 unit	80 unit	80 unit	80 unit	80 unit	12 unit	0	80 unit	0	0	15	0	100	0	0
31	Tersedianya LPJU	20 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	40 unit	12 unit	0	0	0	0	30	0	0	0	0

Tabel 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Flores Timur

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Program SKPD	6,800,337,300	6,677,268,650	6,952,838,000	7,844,942,850	8,629,437,135	2,242,698,325	4,054,833,691	1,507,797,489	1,019,630,862	-	32.98	60.73	21.69	13.00	0.00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2,035,957,000	2,272,533,050	2,388,200,450	2,647,570,518	2,912,327,569	1,626,482,352	1,708,467,294	2,491,779,355	2,422,263,984	-	79.89	75.18	104.34	91.49	0.00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	773,035,000	888,990,000	900,820,000	920,600,000	1,012,660,000	628,476,630	735,686,680	919,695,540	819,419,950	-	81.30	82.76	102.10	89.01	0.00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	792,319,000	911,166,850	940,450,000	960,500,000	1,056,550,000	665,070,905	614,985,314	808,906,725	-	-	83.94	67.49	86.01	0.00	0.00

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	120,100,000	125,400,000	130,400,000	149,960,000	164,956,000	-	-	-	34,635,000	-	0.00	0.00	0.00	23.10	0.00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	928,707,200	1,088,012,000	1,190,990,000	1,369,638,500	1,506,602,350	728,077,663	1,044,090,865	444,834,906	-	-	78.40	95.96	37.35	0.00	0.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,816,605,000	3,148,830,000	3,308,480,400	3,682,955,110	4,051,250,621	3,371,851,100	2,625,375,254	247,807,200	-	-	119.71	83.38	7.49	0.00	0.00

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	362,856,000	416,682,000	441,814,000	508,503,000	559,353,300	159,862,680	140,871,060	9,300,000	-	-	44.06	33.81	2.10	0.00	0.00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	120,100,000	125,400,000	130,400,000	149,960,000	164,956,000	-	-	-	34,635,000	-	0.00	0.00	0.00	23.10	0.00
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	108,611,000	124,902,000	140,348,000	161,400,200	177,540,220	31,678,000	45,683,000	-	-	-	29.17	36.58	0.00	0.00	0.00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan :

Pengelolaan keuangan daerah secara umum belum tertib sesuai ketentuan yang berlaku khususnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Pengelolaan aset belum sepenuhnya tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Peluang :

Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Misi Reformasi Birokrasi, termasuk pada aspek tatalaksana dengan mendorong pemanfaatan *E-Government*;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rendahnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rendahnya pemahaman terhadap aturan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Lemahnya pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi Kabupaten Flores Timur Periode 2023-2026

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 . Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi pengelolaan keuangan di daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu terhadap pencapaian renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.

Hal tersebut berkaitan dengan penganggaran dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri sebagai berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kemetrian Kementrian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan BKAD Kabupaten Flores Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovatif	Masih rendahnya kualitas SDM perencanaan Anggaran.	Kurangnya ketersediaan dana dan SDM yang terbatas	Adanya program bimtek oleh Pemerintah Pusat
		Belum optimalnya proses penyusunan rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan Daerah	Lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas SDM perencana dan analis kebijakan dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan anggaran Daerah	- Adanya Permendagri dan Permenkeu tentang Perencanaan anggaran daerah - Adanya Referensi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dapat diakses melalui situs Kementerian terkait maupun chanel youtube.
		Belum optimalnya proses penyusunan dokumen perencanaan anggaran daerah	Belum tersedianya data yang baik dan kapasitas SDM yang memadai dalam proses penyusunan.	adanya perhatian dan dukungan data dari setiap OPD
		Belum sinkron dan sinerginya antara dokumen perencanaan daerah dengan perencanaan anggaran	Kecenderungan aparaturne perencana yang merenrencanakan anggaran yang tidak menyelesaikan masalah	Tuntutan per-UU-an yang menuntut sistem penyusunan dan penganggaran terpadu
		Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan	Penyediaan Dana kegiatan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan	Penyediaan dana disesuaikan dengan kalender kerja

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang diwilayah Kabupaten Flores Timur tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian, dalam penyusunan Renstra ini, tidak dilakukan penelaahana terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan tugas, fungsi dan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra Bappenas maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Rendahnya kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun, dengan visi RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 – 2025 yakni

“Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing”

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, adalah sebagai berikut :

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal dengan sasaran :

1. Terwujudnya jaminan kehidupan bermartabat;
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
3. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset serta pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025		
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Opini BPK (Opini)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		· Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan (%) · Persentase Rekomendasi Temuan yang ditindaklanjuti.	35,71	40,82	45,92	51,02	56,12	56,12	

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penertiban Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan arah kebijakan pembangunan kabupaten Flores Timur merupakan suatu untuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah bersama *stakeholder* terkait agar lebih optimal dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan pembangunan kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2023-2026, sebagaimana diuraikan pada tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2

Arah Kebijakan Pembangunan dari masing-masing Startegi Pembangunan
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

Strategi		Arah Kebijakan			
		2023	2024	2025	2025
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik					
1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Penertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Pendampingan pengelolaan keuangan dan asset daerah		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Badan Keuangan dan Aset Daerah akan menjalankan 2 (dua) program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaranyaitu :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaituProgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1berikut :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PERIODE 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Unit kerja SKPD Penanggungjaw ab	Lokasi								
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026		Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan										
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target			Rp							
1	2	3	4					5	6	7	8	9		10	11		12	13		14	15		16	17		18	19		
Tervujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				283,111,148,665		265,110,683,206		265,168,901,253		265,175,475,831		1,078,566,208,956								
			5	0.2				Keuangan									19,288,154,956												
			5	0.2	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan danPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100	19,321,727,723	100	19,297,264,079	100	19,296,802,650	100	19,243,714,956	100	76,582,455,980								
										Presentase Keterseediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100		100		100		100		100									
										Presentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	100		100		100		100		100									
										Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100		100		100		100		100									
			5	0.2	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	12	10	44,999,800	10	62,850,000	10	63,478,500	10	75,000,000	40	246,328,300	Sekretariat	Larantuka						
			5	0.2	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	4	4	10,000,000	4	15,000,000.0	4	15,150,000.0	4	17,500,000.0	12	57,650,000	Sekretariat	Larantuka						
			5	0.2	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	4	4	10,000,000	4	15,000,000.0	4	15,150,000.0	4	17,500,000.0	12	57,650,000	Sekretariat	Larantuka						
			5	0.2	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	10	14,500,000	10	17,500,000.0	10	17,675,000.0	10	20,000,000.0	40	69,675,000	Sekretariat	Larantuka						
			5	0.2	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	10,499,800	3	15,350,000.0	3	15,503,500.0	3	20,000,000.0	12	61,353,300	Sekretariat	Larantuka						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi					
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026		Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp							
1	2	3	4					5	6	7	8	9		10	11		12	13		14	15		16	17	18	19	
			5	0.2	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Tahunan (dok)	2	38	17,999,407,502		38	18,053,206,321		38	18,017,359,502		38	17,950,909,502		152	71,826,984,827		Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bln)	35/14	35/14	17,923,409,502		35/14	17,959,256,321.00		35/14	17,923,409,502		35/14	17,923,409,502		35/14	71,729,484,827		Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	2	2	20,000,000		2	25,000,000.0		2	25,000,000.0		2	27,500,000.0		2	97,500,000		Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	36	36	55,998,000		36	68,950,000.0		36	68,950,000.0		36	70,250,000.0		144	264,148,000		Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan Manajemen Ase/Barang Milik Daerah (dok)		3	85,000,000		3	105,000,000		3	105,000,000		3	121,050,000		12	416,050,000			
			5	0.2	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		1	35,000,000		1	45,000,000.0		1	45,000,000.0		1	50,450,000.0		4	175,450,000		Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)		2	50,000,000		2	60,000,000.0		2	60,000,000.0		2	70,600,000.0		8	240,600,000		Sekretariat	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan		Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			5	0.2	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		2	150,000,000	2	167,500,000	2	163,500,000	2	165,135,000	8	646,135,000		
			5	0.2	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)		2	25,000,000	2	37,500,000.0	2	37,500,000.0	2	37,875,000.0	8	137,875,000	Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		5	50,000,000	5	60,000,000.0	5	60,000,000.0	5	60,600,000.0	20	230,600,000	Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		5	25,000,000	5	20,000,000.0	5	16,000,000.0	5	16,160,000.0	20	77,160,000	Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)		5	50,000,000	5	50,000,000.0	5	50,000,000.0	5	50,500,000.0	20	200,500,000	Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	100	256,129,029	100	221,460,000	100	209,468,000	100	238,562,680	100	925,619,709	Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	5	5	4,979,029	5	7,500,000.0	5	7,500,000.0	5	10,575,000.0	20	30,554,029	Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	30,000,000	2	25,000,000.0	2	25,000,000.0	2	25,250,000.0	8	105,250,000	Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	2	2	55,000,000	2	50,000,000.0	2	50,000,000.0	2	60,000,000.0	8	215,000,000	Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	2	50,000,000	2	50,000,000.0	2	50,000,000.0	2	65,000,000.0	8	215,000,000	Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	2	2	1,200,000	2	2,000,000.0	2	2,000,000.0	2	2,020,000.0	8	7,220,000	Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	40,000,000	2	27,000,000.0	2	27,000,000.0	2	27,270,000.0	8	121,270,000	Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	2	2	49,950,000	2	39,960,000.0	2	31,968,000.0	2	32,287,680.0	8	154,165,680	Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.06	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	2	25,000,000	2	20,000,000.0	2	16,000,000.0	2	16,160,000.0	8	77,160,000	Sekretariat	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026		Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan					
																			Target	Rp				
1	2	3	4					5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			5	0.2	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(unit)		16	130,500,000	16	104,400,000	26	149,320,412	16	106,498,440	74	107,563,424				
			5	0.2	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)						10	43,876,412.0							Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)		4	45,000,000	4	36,000,000.0	4	36,360,000.0	4	36,723,600.0	4	37,090,836.0			Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)		6	35,500,000	6	28,400,000.0	6	28,684,000.0	6	28,970,840.0	6	29,260,548.4			Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)		6	50,000,000	6	40,000,000.0	6	40,400,000.0	6	40,804,000.0	6	41,212,040.0			Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95	100	545,800,000	100	482,000,000	100	486,820,000	100	483,684,536	100	1,998,304,536			Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	12	1,800,000	12	2,000,000.0	12	2,020,000.0	12	2,040,200.0	48	7,860,200			Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	12	160,000,000	12	130,000,000.0	12	131,300,000.0	12	124,609,336.0	48	545,909,336			Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	384,000,000	12	350,000,000.0	12	353,500,000.0	12	357,035,000.0	48	1,444,535,000			Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (%)	100	100	109,891,392	100	100,847,758	100	101,856,236	100	102,874,798	100	415,470,184			Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	29	31	45,000,000	31	40,000,000.0	31	40,400,000.0	31	40,804,000.0	124	166,204,000			Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (unit)		25	25,000,000	25	28,048,158.0	25	28,328,639.6	25	28,611,926.0	100	109,988,724			Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1	1	2,999,500	1	2,399,600.0	1	2,423,596.0	1	2,447,832.0	1	10,270,528			Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)		3	25,000,000	3	20,000,000.0	3	20,200,000.0	3	20,402,000.0	12	85,602,000			Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (unit)		1	3,000,000	1	2,400,000.0	1	2,424,000.0	1	2,448,240.0	1	10,272,240			Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)		1	5,891,892	1	5,000,000.0	1	5,050,000.0	1	5,100,500.0	1	21,042,392			Sekretariat	Larantuka
			5	0.2	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)		2	3,000,000	2	3,000,000.0	2	3,030,000.0	2	3,060,300.0	8	12,090,300			Sekretariat	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026		Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan							
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4					5	6	7	8	9		10	11		12	13		14	15		16	17	18	19
			5	0.2	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah (%)	100	100	263,109,589,942	100	245,253,166,242	100	245,306,243,190	100	245,360,246,907	100	999,029,246,281	Bidang Perencanaan Anggaran	Larantuka				
			5	0.2	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah (dok)	18	18	3,548,035,700	18	2,838,428,560	18	2,870,412,846	18	2,903,112,974	72	12,159,990,080	Bidang Perencanaan Anggaran	Larantuka				
			5	0.2	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (dok)	2	2	350,623,000	2	280,498,400.0	2	283,303,384.0	2	286,136,417.8	8	1,200,561,202	Bidang Perencanaan Anggaran	Larantuka				
			5	0.2	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (dok)	2	2	340,413,000	2	272,330,400.0	2	275,053,704.0	2	277,804,241.0	8	1,165,601,345	Bidang Perencanaan Anggaran	Larantuka				
			5	0.2	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (dok)	50	50	35,000,000	50	28,000,000.0	50	28,280,000.0	50	28,562,800.0	200	119,842,800	Bidang Perencanaan Anggaran	Larantuka				
			5	0.2	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (dok)	50	50	35,000,000	50	28,000,000.0	50	28,280,000.0	50	28,562,800.0	200	119,842,800	Bidang Perencanaan Anggaran	Larantuka				
			5	0.2	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (dok)	50	50	35,000,000	50	28,000,000.0	50	28,280,000.0	50	28,562,800.0	200	119,842,800	Bidang Perencanaan Anggaran	Larantuka				
			5	0.2	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (dok)	50	50	35,000,000	50	28,000,000.0	50	28,280,000.0	50	28,562,800.0	300	119,842,800	Bidang Perencanaan Anggaran	Larantuka				
			5	0.2	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (dok)	2	2	1,589,300,000	2	1,271,440,000.0	2	1,284,154,400.0	2	1,296,995,944.0	8	5,441,890,344	Bidang Perencanaan Anggaran	Larantuka				
			5	0.2	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (dok)	2	2	735,700,000	2	588,560,000.0	2	594,445,600.0	2	600,390,056.0	8	2,519,095,656	Bidang Perencanaan Anggaran	Larantuka				
			5	0.2	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (dok)	2	2	200,000,000	2	160,000,000.0	2	161,600,000.0	2	163,216,000.0	8	684,816,000	Bidang Perencanaan Anggaran	Larantuka				
			5	0.2	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (dok)	2	2	46,999,900	2	37,599,920.0	2	37,975,919.2	2	38,355,678.4	8	160,931,418	Bidang Perencanaan Anggaran	Larantuka				
			5	0.2	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (dok)	2	2	53,000,000	2	42,400,000.0	2	42,824,000.0	2	43,252,240.0	8	181,476,240	Bidang Perencanaan Anggaran	Larantuka				
			5	0.2	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (dok)	2	2	46,999,800	2	37,599,840.0	2	37,975,838.4	2	38,355,596.8	8	160,931,075	Bidang Perencanaan Anggaran	Larantuka				
			5	0.2	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	12	50	45,000,000	50	36,000,000.0	50	39,960,000	50	44,355,600	200	165,315,600	Bidang Perencanaan Anggaran	Larantuka				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026		Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan				
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4					5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			5	0.2	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah (dok)	48	48	706,200,000	48	564,960,000	48	570,609,600	48	576,315,696	184	2,418,085,296	Bidang Perbendaharaan	Larantuka	
			5	0.2	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dok)	12	12	270,000,000	12	216,000,000.0	12	218,160,000.0	12	220,341,600.0	48	924,501,600	Bidang Perbendaharaan	Larantuka	
			5	0.2	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (dok)	50	50	120,000,000	50	96,000,000.0	50	96,960,000.0	50	97,929,600.0	200	410,889,600	Bidang Perbendaharaan	Larantuka	
			5	0.2	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (dok)	2	2	25,000,000	2	20,000,000.0	2	20,200,000.0	2	20,402,000.0	8	85,602,000	Bidang Perbendaharaan	Larantuka	
			5	0.2	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (dok)	19	19	20,000,000	19	16,000,000.0	19	16,160,000.0	19	16,321,600.0	76	68,481,600	Bidang Perbendaharaan	Larantuka	
			5	0.2	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (dok)	2	2	25,000,000	2	20,000,000.0	2	20,200,000.0	2	20,402,000.0	8	85,602,000	Bidang Perbendaharaan	Larantuka	
			5	0.2	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (laporan)	3	3	80,480,000	3	64,384,000.0	3	65,027,840.0	3	65,678,118.4	12	275,569,958	Bidang Perbendaharaan	Larantuka	
			5	0.2	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (dok)	5	5	20,000,000	5	16,000,000.0	5	16,160,000.0	5	16,321,600.0	20	68,481,600	Bidang Perbendaharaan	Larantuka	
			5	0.2	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (dok)	2	2	85,720,000	2	68,576,000.0	2	69,261,760.0	2	69,954,377.6	8	293,512,138	Bidang Perbendaharaan	Larantuka	
			5	0.2	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (dok)	2	2	25,000,000	2	20,000,000.0	2	20,200,000.0	2	20,402,000.0	8	85,602,000	Bidang Perbendaharaan	Larantuka	
			5	0.2	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	50	50	35,000,000	50	28,000,000.0	50	28,280,000.0	50	28,562,800.0	200	119,842,800	Bidang Perbendaharaan	Larantuka	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi						
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2023		2024		2025		2026		Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target			Rp					
1	2	3	4					5	6	7	8	9		10	11		12	13		14	15		16	17	18	19	
			5	0.2	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (dok)	35	35	1,009,982,800		35	807,986,240		35	816,066,102		35	824,226,763		140	3,458,261,906		Bidang Akuntansi	Larantuka
			5	0.2	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (laporan)	3	3	44,999,800		3	35,999,840.0		3	36,359,838.4		3	36,723,436.8		12	154,082,915		Bidang Akuntansi	Larantuka
			5	0.2	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (dok)	4	4	39,990,000		4	31,992,000.0		4	32,311,920.0		4	32,635,039.2		16	136,928,959		Bidang Akuntansi	Larantuka
			5	0.2	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (laporan)	4	4	39,999,000		4	31,999,200.0		4	32,319,192.0		4	32,642,383.9		16	136,959,776		Bidang Akuntansi	Larantuka
			5	0.2	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (laporan)	4	4	29,995,000		4	23,996,000.0		4	24,235,960.0		4	24,478,319.6		16	102,705,280		Bidang Akuntansi	Larantuka
			5	0.2	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (dok)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (dok)	2	2	624,999,500		2	499,999,600.0		2	504,999,596.0		2	510,049,592.0		8	2,140,048,288		Bidang Akuntansi	Larantuka
			5	0.2	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dok)	2	2	34,999,800		2	27,999,840.0		2	28,279,838.4		2	28,562,636.8		8	119,842,115		Bidang Akuntansi	Larantuka
			5	0.2	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dok)	1	1	125,000,000		1	100,000,000.0		1	101,000,000.0		1	102,010,000.0		1	428,010,000		Bidang Akuntansi	Larantuka
			5	0.2	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (dok)	1	1	35,000,000		1	28,000,000.0		1	28,280,000.0		1	28,562,800.0		4	119,842,800		Bidang Akuntansi	Larantuka
			5	0.2	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (dok)	1	1	34,999,700		1	27,999,760.0		1	28,279,757.6		1	28,562,555.2		4	119,841,773		Bidang Akuntansi	Larantuka
			5	0.2	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Bantuan Keuangan Daerah, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil (laporan)	18	18	256,924,971,442		18	240,305,471,442		18	240,305,471,442		18	240,305,471,442		72	977,841,385,768		BKAD	Larantuka
			5	0.2	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (laporan)	1	1	249,070,228,360		1	232,527,471,442		1	232,527,471,442		1	232,527,471,442		4	946,652,642,686		BKAD	Larantuka
			5	0.2	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (laporan)	1	1	6,276,743,082		1	6,200,000,000		1	6,200,000,000		1	6,200,000,000		4	24,876,743,082		BKAD	Larantuka
			5	0.2	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (laporan)	1	1	1,578,000,000		1	1,578,000,000		1	1,578,000,000		1	1,578,000,000		4	6,312,000,000		BKAD	Larantuka
			5	0.2	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan (dok)	2	2	920,400,000		2	736,320,000.0		2	743,683,200.0		2	751,120,032.0		8	3,151,523,232		BKAD	Larantuka
			5	0.2	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (dok)	1	1	920,400,000		1	736,320,000.0		1	743,683,200.0		1	751,120,032.0		4	3,151,523,232		BKAD	Larantuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
			URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				2023		2024		2025		2026		Target Capaian pada Akhir Tahun perencanaan				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Target	Rp			
			5	0.2	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Aset (%)	0.93	0.93	679,831,000	0.93	560,252,885	0.93	565,855,414	0.93	571,513,968	87.25	2,377,453,267	Bidang Aset	Larantuka
			5	0.2	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah (dok)	0.93	0.93	679,831,000	0.93	560,252,885	0.93	565,855,414	0.93	571,513,968	87.25	2,377,453,267	Bidang Aset	Larantuka
			5	0.2	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (dok)	1	1	78,038,500	1	78,818,885.0	1	79,607,073.9	1	80,403,144.6	4	316,867,603	Bidang Aset	Larantuka
			5	0.2	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (dok)		1	35,000,000	1	28,000,000.0	1	28,280,000.0	1	28,562,800.0	4	119,842,800	Bidang Aset	Larantuka
			5	0.2	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (dok)	1	1	32,500,000	1	26,000,000.0	1	26,260,000.0	1	26,522,600.0	4	111,282,600	Bidang Aset	Larantuka
			5	0.2	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (dok)		1	35,000,000	1	28,000,000.0	1	28,280,000.0	1	28,562,800.0	4	119,842,800	Bidang Aset	Larantuka
			5	0.2	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (laporan)	2	2	34,932,500	2	27,946,000.0	2	28,225,460.0	2	28,507,714.6	8	119,611,675	Bidang Aset	Larantuka
			5	0.2	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (laporan)	2	2	34,910,000	2	27,928,000.0	2	28,207,280.0	2	28,489,352.8	8	119,534,633	Bidang Aset	Larantuka
			5	0.2	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (laporan)	2	2	139,450,000	2	111,560,000.0	2	112,675,600.0	2	113,802,356.0	8	477,487,956	Bidang Aset	Larantuka
			5	0.2	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (laporan)		2	75,000,000	2	60,000,000.0	2	60,600,000.0	2	61,206,000.0	8	256,806,000	Bidang Aset	Larantuka
			5	0.2	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (laporan)		2	75,000,000	2	60,000,000.0	2	60,600,000.0	2	61,206,000.0	8	256,806,000	Bidang Aset	Larantuka
			5	0.2	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (laporan)	2	2	45,000,000	2	36,000,000.0	2	36,360,000.0	2	36,723,600.0	8	154,083,600	Bidang Aset	Larantuka
			5	0.2	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (laporan)	2	2	20,000,000	2	16,000,000.0	2	16,160,000.0	2	16,321,600.0	8	68,481,600	Bidang Aset	Larantuka
			5	0.2	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	2	2	50,000,000	2	40,000,000.0	2	40,400,000.0	2	40,804,000.0	8	171,204,000	Bidang Aset	Larantuka
			5	0.2	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	4	4	25,000,000	4	20,000,000.0	4	20,200,000.0	4	20,402,000.0	8	85,602,000	Bidang Aset	Larantuka

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026.Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam urusan penunjang urusan pemerintahan, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	%	5	5	5	5	5	5
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	5	5	5	5	5	5
4	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0	0	0	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	20	20	20	20	20
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	10	10	10	10	10
7	Penetapan APBD	%	30 Nov	30 Nov	30 Nov	30 Nov	30 Nov	30 Nov

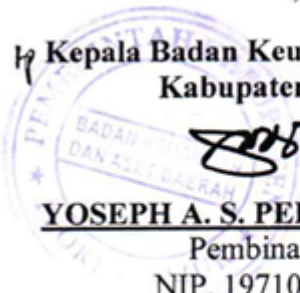
BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026. Renstra ini berisikan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 4 (empat) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan empat tahunan.

Semoga Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 dapat acuan bagi segenap jajaran pimpinan struktural maupun staf di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur.

 **Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Flores Timur,**


YOSEPH A. S. PEHAN KERAF, SE, M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 197104261998031012